

PEMBANGUNAN NASIONAL ADALAH PROSES AKULTURASI

A.M.W. PRANARKI

Permasalahannya

Sudah sejak lima tahun yang lalu kita dilibatkan dengan debat dan kontroversi mengenai pembangunan nasional. Pada tahun 1960 orang masih bertanya-tanya: apakah pembangunan nasional ini benar-benar satu tekad yang sesungguhnya, atautkah sekedar satu issue politik semata-mata. Dalam tahun itu masih terdapat juga pertentangan-pertentangan mengenai manakah yang harus didahulukan: pembangunan ekonomi atautkah perombakan pola dan struktur politik negara.

Setahun kemudian, pada tahun 1969, ketika PELITA I diputuskan pelaksanaannya, banyak diadakan debat dan diskusi sekitar hakikat dari pembangunan itu sendiri. Apakah itu pembangunan nasional? Apakah kriteria dan pedoman-pedoman pembangunan? Bagaimanakah pembangunan harus direncanakan? Masyarakat macam apakah yang kita cita-citakan? Orang berbincang-bincang mengenai soal-soal fundamental di dalam pembangunan nasional. Issue-issue utama antara lain adalah: modernisasi, sekularisasi, westernisasi, industrialisasi, pola tradisional dan sebagainya.

Pada tahun 1971, belum lagi jawaban-jawaban mantap bisa dirumuskan, telah timbul satu kontroversi lain lagi. Tema utama di dalam waktu ini adalah pola dan struktur politik serta tata pemerintahan. Soal yang dilontarkan adalah: apakah sistim politik, sistim tata pemerintahan dan sistim kepemimpinan yang ada di Indonesia ini akan memungkinkan terwujudnya pembangunan nasional yang nyata. Issue-issue pokok adalah: clean government, korupsi, kepartaian, dwifungsi ABRI, partisipasi rakyat, demokrasi serta hak-hak azasi dan negara hukum. Sementara itu banyak dibahas pula hambatan-hambatan kultural untuk pembangunan, khususnya hambatan-hambatan mental.

Sementara itu, pada tahun 1972-1973, tersebar lagi debat-debat baru mengenai pembangunan. Banyak dipersoalkan mengenai kegagalan atau salah arah pembangunan selama PELITA I. Kritik-

kritik bermunculan di mana-mana. Issue-issue terpenting adalah soal sistim pembangunan, assumsi pembangunan nasional, metode dan approach pembangunan, keadilan sosial dan perataan serta tentang model-model pembangunan.

Demikianlah selama lima tahun terakhir telah terjadi berbagai debat dan kontroversi. Ada yang bercorak fundamental, ada yang bersifat methodologis, ada yang bersifat politis maupun kulturil. Ada yang berkenaan dengan dasar-dasar metode perencanaan pembangunan nasional, ada tentang orientasinya, dan ada pula yang menyangkut pelaksanaan pembangunan itu.

Egitu cepatnya issue dan materi di dalam proses kontroversi itu sehingga kita lebih dijonuhkan dengan problematik pembangunan daripada diringankan dengan kemungkinan-kemungkinan pemecahannya. Analisa yang kami ajukan ini, tidaklah dimasukkan untuk lebih memperberat problematik, melainkan ingin mencoba menelaah gejala-gejala kontroversi tersebut, dan mencoba memberikan satu titik tolak dan serta merta juga satu titik temu dari berbagai pikiran yang sudah bermunculan itu.

Pokok pikiran yang kami kemukakan adalah: bahwa pembangunan nasional adalah satu proses akulturasi. Dengan pokok pikiran ini kami harap bisa sedikit menjernihkan persoalan-persoalan yang fundamental, yang methodologis maupun yang bersangkutan dengan masalah pelaksanaannya. Segala debat dan kontroversi yang jujur biasanya berkecenderungan menokankan salah satu dimensi dari pembangunan nasional. Bahaya terbesar dari kenyataan ini adalah terjadinya proses absolutisasi dari kenyataan-kenyataan yang pada dasarnya sepihak itu. Sedang bahaya yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila kompleksitas problematik pembangunan tersebut dieksploitir oleh interesse-interesse politik, dan sasaran utama justru 'mementahkan kembali secara terus-menerus' gerak pembangunan yang sudah digariskan bersama. Di dalam kenyataan ini maka diperlukan titik synthesa di mana dimungkinkan komunikasi dari aliran-aliran yang ada, dan dengan demikian ditemukan pedoman-pedoman yang lebih definitif dan lebih konstruktif.

Mengapa akulturasi

Mengapa digunakan faham akulturasi? Bukankah akulturasi terjadi apabila terdapat pertemuan antara dua kebudayaan atau lebih? Apakah pembangunan nasional dengan demikian lebih dilihat

sebagai satu proses kebudayaan, dan apakah dengan demikian orientasi pragmatis kepada pembangunan ekonomi harus dilepaskan.

Memang akulturasi mengandaikan adanya pertemuan antara dua pola kebudayaan atau lebih. Dan memang pembangunan nasional merupakan usaha mempertemukan antara dua pola sosial budaya. Akan tetapi untuk tidak segera mengambil kesimpulan yang gegabah, perlulah memberikan beberapa ulasan mengenai faham akulturasi dan hubungannya dengan pembangunan.

Pembangunan sosial, di manapun juga akan merupakan pembangunan dari manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Manusia adalah sangkan dan serta merta paran pembangunan. Dengan vokabuler Aristoteles, maka bisa dikatakan bahwa manusia adalah: *causa efficiens* dan serta merta juga *causa finalis* di dalam pembangunan.

Akan tetapi manusia yang terlibat dengan pembangunan itu selalu adalah manusia yang konkrit: di dalam dunia, di dalam sejarah. Manusia - dunia - sejarah adalah aspek-aspek pokok di dalam segala proses pembangunan. Pembangunan adalah interaksi antara manusia dengan manusia, interaksi antara manusia dengan dunia dan semua ini terjadi di dalam sejarah. Berbicara secara lebih jelas dan konkrit lagi maka di dalam pembangunan nasional ini yang kita bicarakan adalah: manusia Indonesia, dengan alam dunia Indonesia, di dalam perkembangan sejarah Indonesia ini. Dengan demikian jelas harus dipertimbangkan juga segala tuntutan sosial maupun tuntutan perkembangan sejarah, tidak hanya nasional tetapi juga internasional.

Yang penting dari pikiran ini adalah bahwa kita menemukan subyek utama dari proses pembangunan tersebut. Hal ini teramat penting sebab tidak jarang terjadi satu fallacy dengan mengadakan obyektivasi dari pembangunan: kita menempatkan pembangunan sebagai sesuatu yang terletak di luar subyek pembangunan itu, yang harus dikejar, tetapi tanpa melihat bahwa pembangunan itu juga sesuatu yang intrinsik di dalam subyek sendiri. Fallacy ini membawa banyak akibat yang pada pokoknya akan menyebabkan proses pembangunan itu justru dialienasikan dari subyek utamanya. Dan di dalam faham akulturasi, ditegaskannya subyek ini secara definitif adalah sesuatu hal yang sangat penting dan prinsipial. Banyak debat dan kontroversi mengenai pembangunan justru disibukkan dengan hal-hal di luar subyek utama ini, dan dengan demikian sukarlah ditemukan titik temu baik secara teoritis maupun secara praktisnya.

Kesimpulan lain yang perlu ditarik dari pangkal pikiran di atas adalah bahwa pembangunan sosial meminta dikembangkan-nya kekuatan-kekuatan di luar manusia (alam, natural resources) maupun kekuatan-kekuatan di dalam diri manusia (within the human resources). Manusia merupakan salah satu kekuatan yang harus dikembangkan, sebab manusia adalah faktor atau subyek yang harus mengemban pembangunan itu.

Subyek utama pembangunan nasional adalah manusia-manusia Indonesia yang sudah disatukan di dalam satu entitas politik negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai satu entitas adalah subyek pembangunan nasional. Untuk mencapai perwujudan pembangunan itu maka harus dikembangkan kekuatan-kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan manusia di Indonesia sebagai satu entitas tersebut. Untuk ini maka populasi merupakan faktor strategis di dalam proses pembangunan tersebut. Subyek riil dari pembangunan nasional sesungguhnya adalah penduduk Indonesia ini.

Itulah sebabnya maka proses pembangunan nasional jelas harus disertai dengan satu kebijaksanaan kependudukan. Tetapi ini harus diartikan secara luas, baik secara struktural kuantitatif maupun secara kultural kualitatif. Mengembangkan penduduk Indonesia menjadi subyek-subyek utama (sebagai kekuatan strategis) di dalam proses pembangunan, itulah dapat dinamakan satu politik kebudayaan dalam arti makro. Penduduk adalah subyek utama di dalam proses akulturasi.

Bila kita telah temukan subyek proses pembangunan (dan juga subyek proses akulturasi) maka harus dipikirkan bahwa pembangunan selalu menginginkan perubahan, ingin mewujudkan hal-hal yang baru. Pertemuan antara apa yang ada dengan hal-hal baru yang diinginkan, itulah satu proses akulturasi. Sebab yang dimaksud bukan terjadinya proses di mana subyek-subyek utama itu menjadi hilang (satu proses konflik yang menghasilkan peleburan) akan tetapi yang diinginkan adalah satu proses di mana subyek-subyek itu mengembangkan diri, memperkaya diri, memajukan diri. Inilah arti pokok dari faham akulturasi. Bukan hapusnya subyek utama di dalam perubahan-perubahan sosial itu, melainkan dimajukan subyek tersebut. Menjadikan penduduk Indonesia faktor yang strategis dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia baru (secara struktural maupun secara kultural) itulah arah proses akulturasi. Dan itulah arah pokok pula di dalam proses pembangunan.

Mungkin ada pertanyaan: bagaimanakah kemudian hubungan antara faham akulturasi ini dengan tuntutan perkembangan ekonomi dan teknologi? Kami kira faham akulturasi akan memberikan titik temu. Sebab akulturasi selalu merupakan satu proses yang konkrit. Dan di dalam perkembangan riil dewasa ini, maupun untuk masa depan Indonesia, jelas perlu sekali bahwa Indonesia, sebagai subyek utama pembangunan itu, harus berkembang tidak hanya sebagai satu entitas politik, tetapi juga harus menjadi satu entitas ekonomi, menuju satu komunitas ekonomi baru. Tentu saja terwujudnya komunitas ekonomi baru itu tetap akan harus berpijak pada azas: dari rakyat Indonesia, oleh rakyat Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Dan population policy sangat penting untuk mewujudkan kenyataan yang dicita-citakan itu. Dengan perkataan lain: faham akulturasi bertitik tolak dari penduduk Indonesia sebagai subyek utama pembangunan nasional. Faham akulturasi selanjutnya harus diikuti dengan perencanaan akulturasi yaitu bagaimanakah membuat populasi Indonesia menjadi kekuatan strategis di dalam menghadapi tuntutan sosial dan tantangan sejarah, antara lain harus menjadi kekuatan Indonesia sebagai satu komunitas ekonomi dan komunitas teknologi.

Mengetasi berbagai fallacies

Fallacy adalah kekeliruan di dalam cara berpikir. Ia bukan kesalahan total, tetapi bisa menjurus ke arah kesalahan total tersebut. Salah satu fallacy yang sudah kami kemukakan adalah: mengalienasikan pembangunan dari subyek utamanya, karena pembangunan telah diobyektivasikan, padahal pembangunan adalah sesuatu yang berjalanan dengan subyek tersebut. Pembangunan bukanlah sesuatu di luar subyek, melainkan sesuatu yang harus diciptakan, dikerjakan oleh subyek pembangunan.

Fallacy tersebut juga membawa akibat bahwa banyak diskusi-diskusi mengenai pembangunan terlalu suka membahas pengertian-pengertian seperti modernisasi, sekularisasi, westernisasi sebagai sesuatu yang terlepas dari struktur maupun kultur rakyat Indonesia. Sekulturisasi kiranya jelas satu faham yang mempunyai latar belakang yang berlainan dengan pola struktural dan kulturil Indonesia, meskipun sebagai gejala kemanusiaan mempunyai titik pertemuannya pula. Dengan faham westernisasi

jelas nampak proses alienasi pembangunan nasional. Dan dengan modernisasi, tanpa menempatkannya di dalam konteks akulturasi, juga akan membawa akibat alienasi.

Fallacy lain yang kerap terjadi adalah fallacy kesopihakan, pars prototo atau 'one-sidedness'. Inilah kiranya yang telah mengakibatkan banyak perdebatan sekitar economic dan non-economic approach, serta bermacam perdebatan lain mengenai prioritas. Pastilah sebagai annihilasi dari aspek-aspek lain. Faham akulturasi memberikan titik temu atau jembatan komunikasi dengan mengemukakan bahwa baik non-economic maupun economic-approach, semuanya adalah dari satu subyek dan untuk satu subyek, yaitu rakyat Indonesia dan negara Indonesia sebagai satu entitas.

Penutup

Apa yang harus ditemukan adalah titik temu dari berbagai approach dan komunikasi antara berbagai metode pembangunan sosial. Memang pada dasarnya satu proses pembangunan adalah kompleks. Tetapi ini harus diartikan bahwa kita perlu menemukan sistimatik yang jelas dan konsisten di dalam usaha memecahkan dan mewujudkannya. Dengan faham akulturasi ingin dikemukakan titik temu tersebut, terutama dengan menegaskan subyek utama dari proses pembangunan, dan membuat supaya pembangunan tidak dialienasikan dari subyeknya itu. Secara konkrit faham akulturasi ingin membuat penduduk Indonesia sebagai kekuatan strategis di dalam proses pembangunan.

Dengan demikian maka yang harus dipikirkan adalah: bagaimanakah Indonesia bisa merencanakan proses akulturasi itu? Apakah isi dari proses akulturasi itu. Dan bagaimana bisa digerakkan dan dipimpin satu proses akulturasi ini secara sehat. Inilah kiranya masalah-masalah yang perlu dipikirkan lebih lanjut.